

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

#### **2.1 Profil Kabupaten Klaten**

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Klaten memiliki visi untuk menciptakan Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Sedangkan misi yang hendak diwujudkan adalah: 1. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat; 2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spirituil dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam mengaktualisasi diri dalam pembangunan; 4. Menumbuhkan perekonomian rakyat yang dinamis, berbasis sumber daya lokal dan berpikiran global untuk mengurangi angka kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan; 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan; 7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai; 8.

Mendorong pelaksanaan otonomi desa dengan menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan kawasan. Kabupaten Klaten memiliki wilayah seluas 665,56km<sup>2</sup> dan secara administratif terbagi dalam 26 kecamatan dan 401 desa/kelurahan.

### **1.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten**

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak pada 110o 30' – 110o 45' Bujur Timur dan 7o 30' – 7o 45' Lintang Selatan. Disebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY). Kabupaten Klaten berada diantara 3 kota besar, yaitu Kota Yogyakarta (30km), Kota Surakarta (36km), dan Kota Semarang (100km), dan telah dihubungkan dengan jalur transportasi yang cukup memadai. Ketiga kota tersebut memiliki berbagai fasilitas berstandar internasional, seperti Bandar Udara Internasional Adi Sutjipto, Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Bandar Udara Ahmad Yani, dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas, yang tentu saja memberikan berbagai dampak terhadap pertumbuhan Kabupaten Klaten baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kependudukan, maupun aspek lainnya.

**Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten Berdasar Kecamatan**



### 2.1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Klaten

Secara topografi, Kabupaten Klaten terletak diantara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu yang membagi Kabupaten Klaten menjadi 4 wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <100 mdpl, meliputi Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Camas;
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200 mdpal, meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);

3. Wilayah dengan ketinggian 200-400 mdpal, meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1000 mdpal, meliputi Kecamatan Kemalang, sebagian besa Manisrenggo, sebagian kecil Jatinom, dan sebagian kecil Tulung

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang selain menjadi kendala dalam dalam sistem transportasi dan komunikasi, tapi juga telah memberikan berbagai manfaat bagi Kabupaten Klaten. Keuntungan yang dimaksud disini adalah bervariasinya jenis tanaman pangan yang bisa tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten dan banyaknya sumber daya air untuk irigasi, drainase, domestic use maupun kebutuhan air minum. Bahkan, potensi sumber daya air ini telah mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat Kota Surakarta, lewat kerjasama dengan PDAM setempat.

### **2.1.3 Kondisi Demografi Administrasi Kabupaten Klaten**

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2016 adalah 1.163.218 jiwa, yang tersebar pada 26 wilayah kecamatan.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kependudukan Kabupaten Klaten**

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk	1.154.048	1.158.795	1.163.218
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.760	1.768	1.774
<i>Sex Ratio</i> (L/P) (%)	96,4	96,4	96,38

*Sumber :Klaten Dalam Angka- Angka Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016*

Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2016 sebesar 1.163.218 jiwa, terdiri dari 570.898 jiwa penduduk laki-laki dan 592.320 jiwa penduduk perempuan. Naik sebesar 4.747 jiwa (0,38 persen) terhadap tahun 2015.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari 1.760 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2014 meningkat menjadi 1.774 jiwa per km<sup>2</sup> di tahun 2016. Sedangkan untuk *sex ratio* (rasio jenis kelamin ) sedikit mengalami perubahan dari 96,4 persen menjadi 96,38 persen.

Dari gambaran di atas sebaran penduduk Kabupaten Klaten cukup merata, dari 26 kecamatan yang ada hanya 2 kecamatan yang terlihat beda dengan yang lainnya. Kecamatan Trucuk merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak sedangkan kecamatan Kebonarum merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

#### **2.1.4 Kondisi Pemerintahan**

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 19.105.036.101,- naik sebesar 8,73 persen terhadap tahun 2015. Meskipun demikian, realisasi ini hanya sebesar 80,17 persen bila yang sebesar Rp. 23.831.983.800,-.

Dari dua puluh enam kecamatan yang di Kabupaten Klaten, Kecamatan Klaten Utara menjadi penyumbang terbanyak untuk penerima PBB tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.626.882.032,- (8,52 persen). Sedangkan kecamatan yang menyumbang paling sedikit adalah kecamatan Kebonarum dengan nilai sebesar Rp.288.841.354,- (1,51 persen). Pada tahun 2016 terjadi kenaikan PAD sebesar 33 milyar rupiah atau sekitar 27,28 persen dibandingkan tahun 2015.

**Tabel 2.2****APBD Kabupaten Klaten**

APBD	2014	2015	2016
APBD (Milyar)			
Pagu DIPA	1.866	2.151	2.175
Realisasi	1.919	2.178	2.259
DAU (Milyar)	1.143	1.164	1.204
PAD (Milyar)	177	191	224

*Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Klaten 2016*

Peta perpolitikan periode 2016-2019 di Kabupaten Klaten diwarnai oleh dominasi PDI Perjuangan Di parlemen (DPRD) dengan 8 kursi. Partai Gerindra, PKS dan PAN masing-masing memperoleh 5 kursi. PKB di urutan berikutnya dengan perolehan kursi sebanyak 3 kursi. Partai Demokrat Hanura dan PPP masing-masing memperoleh 2 kursi dan 1 kursi terakhir merupakan perwakilan dari Partai Nasdem. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Klaten Periode tahun 2014-2019 yang berjenis kelamin perempuan hanya 3 orang.

### **2.1.5 Kondisi Ketenaga Kerjaan**

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, lapangan usaha paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Klaten adalah perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu sebesar 26,6 persen, disusul dengan

pertanian dengan 22,62 persen dan industry pengolahan dengan 21,66 persen.

Penduduk usia krja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Klaten sebanyak 902,528 jiwa. Dari total penduduk usia kerja tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk Kabupaten Klaten tahun 2015 mengalami penurunan disbanding tahun 2014 dari 70,46 persen menjadi 67,79 pesen. Menurunnya TPAK di tahun 2015 diikuti pula dengan penurunan pesentase penduduk Kabupaten Klaten yang kerja. Penduduk Kabupaten Klaten yang bekerja terus mengalami penurunan dari 69,17 persen di tahun 2013 turun menjadi 67,11 persen di tahun 2014 dan turun lagi menjadi 66,08 persen di tahun 2015.

**Tabel 2.3 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten**

Uraian	2013	2014	2015
TPAK (%)	73,10	70,46	67,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,38	4,75	2,51
Bekerja (%)	69,17	67,11	66,08

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2016*

Jika dilihat selama tiga tahun terakhir, TPT (Tingkat Pengangguran Terbua) di Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan. TPT tahun 2013 sebesar 5,38 persen turun 4,75 persen di tahun 2014 dan turun lagi menjadi 2,51 persen di tahun 2015. Hal ini menggambarkan kondisi yang



baik karena jumlah pengangguran selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

### 2.1.6 Kondisi Pendidikan

Penduduk Kabupaten Klaten rata-rata menyelesaikan pendidikan sampai kelas 2 SMP. Hanya APK jenjang pendidikan SD yang sudah mencapai 100 persen di tahun 2016.

**Tabel 2.4 Indikator Pendidikan Kabupaten Klaten**

Uraian	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf	93,16	93,83	93,5
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,16	8,22
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7-12	99,69	100	99,55
13-15	96,87	96,86	99,49
16-18	82,75	79,18	75,80
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD	109,97	109,59	108,38
SMP	82,33	81,31	99,89
SMA	100,76	104,73	94,53
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	98,48	100	94,55
SMP	76,07	79,02	85,97
SMA	74,22	74,84	70,21

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2016

Jika kita perhatikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2016 kelompok umur 7 -12 tahun dan 13-15 tahun sudah lebih dari 99 persen, masing-masing sebesar 99,55 persen dan 99,49 persen. APS kelompok umur 16-188 tahun justru mengalami penurunan dari 75,8 persen di tahun 2015 menjadi 75,8 persen di tahun 2016.

APK tahun 2016 untuk jenjang pendidikan SD dan SMA mengalami penurunan, hanya jenjang kenaikan. Untuk jenjang pendidikan SD mengalami penurunan 1,21 persen dan SMA mengalami penurunan 10,2 persen. Sedangkan jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan sebesar 18,27 persen.

Seperti halnya APK, hanya jenjang pendidikan SMP yang mengalami kenaikan APM. APM jenjang pendidikan SMP naik sebesar 6,95 persen. Sedangkan jenjang pendidikan SD dan SMA masing-masing mengalami penurunan 5,45 persen dan 4,63 persen.

### 2.1.7 Kondisi Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Angka IPM Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan dari 73,19 pada tahun 2014 menjadi 73,81 pada tahun 2015, meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 73,79. Angka ini ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 69,98 di tahun 2016. Dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Klaten tahun 2016 menduduki peringkat 7.

**Tabel 2.5 Statistik Kemiskinan Kabupaten Klaten**

Uraian	2015	2016
Garis Kemiskinan (Rp/Kabita/Bulan)	340,484	364,240
Jumlah penduduk miskin(000 jiwa)	172,3	168,01
Penduduk Miskin (%)	14,89	14,46

*Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2016*

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten juga masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten tahun 2016 yang sebesar 12,46 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 364.240,- perkapitan perbulan. Persentase tersebut lebih

tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 13,27 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 317. 34,-.

#### **2.1.8 Tata Cara Pembagian Dana Desa Perdesa di Kabupaten Klaten**

Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. Alokasi Dasar, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Dana Desa di Kabupaten Klaten.
- b. Alokasi Proporsional, merupakan alokasi sebesar 10% (sepuluh persen) yang dibagi berdasar formula yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);  
dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: APBDesa paling lambat bulan Maret; dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.

Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan hasil Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.

## **2.2 Kondisi Geografi Iklim dan Kecamatan Polanharjo**

Kecamatan Polanharjo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Klaten, dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangnom, sebelah Timur dengan Kecamatan Delanggu dan sebelah Barat dengan Kecamatan Tulung. Jarak ibu kota kecamatan Polanharjo ke Kecamatan Delanggu sejauh 4 Kilo meter, Kecamatan Karangnom sejauh 7 Kilo meter, Kecamatan Tulung sejauh 5 Kilo meter dan Kecamatan Ceper sejauh 8 Kilo meter.

Luas wilayah seluas 2.384,84 hektar, terdiri dari lahan sawah seluas 1.823,84 hektar (76,48 persen) dan lahan bukan sawah seluas 561.00 hektar (23,52 persen). Lahan sawah dibagi menjadi berpengairan teknis seluas 1.436,18 hektar (78,74 persen), berpengairan setengah teknis seluas 380,66 hektar (20,88 persen), berpengairan sederhana seluas 7,00 hektar (0,38 persen). Secara Administrasi, Kecamatan Polanharjo dibagi meter menjadi 18 Desa, 115 RW dan 259 RT.



**Tabel 2.6 Jumlah RW dan RT dan Kecamatan Polanharjo**

Desa	RW	RT
1.Glagahwangi	5	11
2.Kapungan	5	14
3.Kauman	13	13
4.Ngaran	6	12
5.Borongon	6	15
6.Nganjat	4	8
7.Jimus	7	11
8.Turus	4	10
9.Polan	7	11
10.Karanglo	6	16
11.Ponggok	6	12
12.Wangen	5	18
13.Keprabon	6	11
14.Kranggan	6	15
15.Kebon Harjo	6	10
16.Janti	6	27
17.Sidowayah	6	17
18.SidoHarjo	11	28
Jumlah	115	259

*Sumber: Statistik Kecamatan Polanharjo 2016*

### **2.2.1 Pemerintahan**

Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Polanharjo tahun 2015 sebanyak 29 pegawai, masih sama apabila dibandingkan terhadap tahun 2014. Apabila dilihat dari jenis kelamin, terdiri dari 22 pegawai laki – laki dan 7 pegawai perempuan. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, tidak ada yang berpendidikan SD. Sebanyak 1 pegawai (3,44 persen) berpendidikan SMP, sebanyak 19 pegawai (65,52 persen) berpendidikan SMA, 3 pegawai (10,34 persen) berpendidikan Diploma, 3 pegawai (10,34 persen) berpendidikan Sarjana dan 3 pegawai (10,34 persen) berpendidikan Magister/ S2. Sedangkan jika dilihat dari golongan gaji, sebanyak 1 pegawai (3,44 persen) mempunyai golongan I, sebanyak 11 pegawai (37,93 persen) mempunyai golongan II, sebesar 15 pegawai (51,72 persen) mempunyai golongan III, sebanyak 2 pegawai (6,90 persen) mempunyai golongan IV.

### **2.2.2 Penduduk**

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kecamatan Polanharjo tahun 2015 sebanyak 36.555 jiwa, naik sebesar 75 jiwa (0,20 persen) terhadap tahun 2014. Terdiri dari penduduk laki – laki 17.815 (48,73 persen) jiwa dan 18.740 (51,27 persen) jiwa penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Polanharjo tercatat sebesar 1.533 jiwa per Km<sup>2</sup> . Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Polanharjo sebesar 95,06. Artinya dari 100 perempuan, hanya ada 95

orang laki-laki. Desa dengan penduduk terbanyak yaitu desa Sidowayah dengan penduduk sebesar 2.874 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah sebesar 1.078 jiwa di Desa Nganjat.

### **2.2.3 Pendidikan**

Jumlah SD sebanyak 35 sekolah turun dibandingkan dengan tahun 2014. Terdiri dari 28 SD Negeri (80,00 persen) dan 6 Madrasah Ibtidaiyah (17,14 persen) dan 1 SD Swasta (2,86 persen). Jumlah murid SD selama tahun 2015 sebanyak 3.249 orang, naik sebanyak 36 orang (1,12 persen) bila dibandingkan tahun 2014. Jika dilihat pengelola sekolah, terdiri dari 2.402 murid Sekolah Dasar Negeri (73,93 persen), 691 murid sekolah Madrasah Ibtidaiyah ( 21,27 persen) dan 156 murid SD Swasta (4,80 persen). Jumlah guru sebanyak 312 orang turun sebanyak 4 orang (1,26 persen) bila dibandingkan tahun 2014. Jumlah SMP selama tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 sekolah. Jumlah murid sebesar 1.328 orang turun sebanyak 28 orang (2,06 persen) bila dibandingkan terhadap tahun 2014 dan jumlah guru sebanyak 104 orang turun sebanyak 3 orang (2,80 persen) bila dibandingkan tahun 2014. Di kecamatan polanharjo terdapat 1 SMA, dengan jumlah siswa th 2015 sebanyak 506 orang dengan rasio murid terhadap guru adalah 8,0.

#### **2.2.4 Kesehatan**

Selama tahun 2015, di Kecamatan Polanharjo terdapat 500 ibu melahirkan, naik sebesar 1,83 persen bila dibandingkan terhadap tahun 2014 sebanyak 491. Jumlah bayi yang dilahirkan sebanyak 505 bayi. Dari bayi yang dilahirkan selama tahun 2015, terdapat 5 kematian bayi.

Tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Polanharjo tahun 2015 adalah dokter praktek swastasebanyak 9 orang, tidak terdapat perubahan bila dibandingkan terhadap tahun 2014 sebanyak 9 orang, Bidan sebanyak 20 orang, naik sebesar 11,11 persen bila dibandingkan tahun 2014 sebanyak 18 orang, Perawat 5 orang, tenaga kefarmasian 1 orang. Untuk tenaga gizi tahun 2015 sebanyak 1 tidak ada perubahan bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 1 orang dan dokter gigi juga 1 orang. Disamping itu di Kecamatan Polanharjo terdapat 4 apotek swasta. Akseptor KB Aktif di Kecamatan Polanharjo pada tahun 2015 sebanyak 4.706 orang turun sebesar 16,66 persen bila dibandingkan terhadap tahun 2014 yang sebanyak 5.647 orang. Jika dilihat dari alat kontrasepsi yang digunakan, 3.123 menggunakan suntik, 472 menggunakan susuk, 286 menggunakan Pil, 500 menggunakan IUD, 218 menggunakan MOW, 92 menggunakan kondom dan 15 yang menggunakan MOP.

### 2.3 Sejarah Desa Ponggok

Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa Ponggok khususnya dan masyarakat desa lain yang pada umumnya. Cerita punya cerita oleh para leluhur / pinisepuh dulu mata air atau yang sering kita sebut umbul, bahwa umbul tersebut diperkirakan akan menjadi sebuah telaga yang sangat besar dan bisa menggenangi pemukiman penduduk sekitarnya, karena mempercayai ada sebuah firasat munculnya sepasang ikan yang menyerupai gereh pethek. Guna mengantisipasi agar umbul air tidak membesar oleh nenek moyang kemudian menanggapi ledhek yang diiringi oleh gamelan komplit dengan niyogonya yang kemudian waranggono beserta gamelannya hilang dan secara tiba-tiba datang seekor burung pungguk yang sangat besar hinggap di plogrok/pojok pohon gayam, dengan bahasa isyarat burung pungguk tersebut bisa menunjukkan salah satu alat gamelan yang menyerupai gong masih utuh terpelihara dengan baik. Karena jasa burung yang berada di plogrok masyarakat sekitar tertuju diplogrok untuk melihat keberadaan burung pungguk yang terkesan ajaib itu.

Untuk mengingat peristiwa tersebut kemudian oleh para pinisepuh desa ini dinamakan kampung ponggok, sampai sekarang pun mata air yang disebut Umbul Ponggok digunakan untuk mandi bahkan dipercayai

oleh masyarakat luas merupakan sumber mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya diwaktu menjelang puasa, ada sebuah tradisi Padusan Umbul Ponggok yang sampai sekarang di era modern tradisi padusan Umbul Ponggok masih ada dan selalu dikunjungi banyak orang. Bahkan pada masa penjajahan Belanda desa ini dijadikan sebuah kota kewedanan karena lokasi yang sangat strategis dan berpotensi maka dibangun sebuah pabrik gula yang dikelilingi bangunan loji yang besar dan sangat megah menghadap timur bersebelahan dengan umbul yang ditandai Prasasti Bunga Tanjung, yang sampai saat ini juga masih utuh untuk hiasan didepan SDN Ponggok. Tempat kantor telepon dan rel jalan lori pengangkut tebu melintasi areal sawah-sawah dengan perkembangan terakhir pabrik gula di Ponggok digunakan sebagai gudang sedang pabriknya berada diwilayah kecamatan karanganom. Pemerintah Desa Ponggok terbentuk setelah adanya ukur tanah yang meliputi dukuh Ponggok, Jeblogan, Kiringan dan Umbulsari yang dijabat oleh seorang Kepala Desa I bernama Amat Sumangun dan dilanjutkan Kepala Desa II bernama R. Karto Hudoyo. Sehabis G30 S PKI Kepala Desa III dijabat Bp. Jinu Sastro Mulyono sampai tahun 1988 dilanjutkan Kepala Desa IV Bp. H. Sunarta dari tahun 1990 s/d 2007 yang masa berakhirnya 12 Januari 2007, diadakan pemilihan kepala desa kembali yang akhirnya pejabat Kepala Desa V sekarang Bp. Junaedhi Mulyono,SH beliau akan menjabat sampai tahun 2019.

**Gambar 2.2 Peta Desa Ponggok**

Sumber: Websaite Desa Ponggok 2017

#### 2.4 Profil Batas Wilayah

**Tabel 2.7 Profil Desa Ponggok**

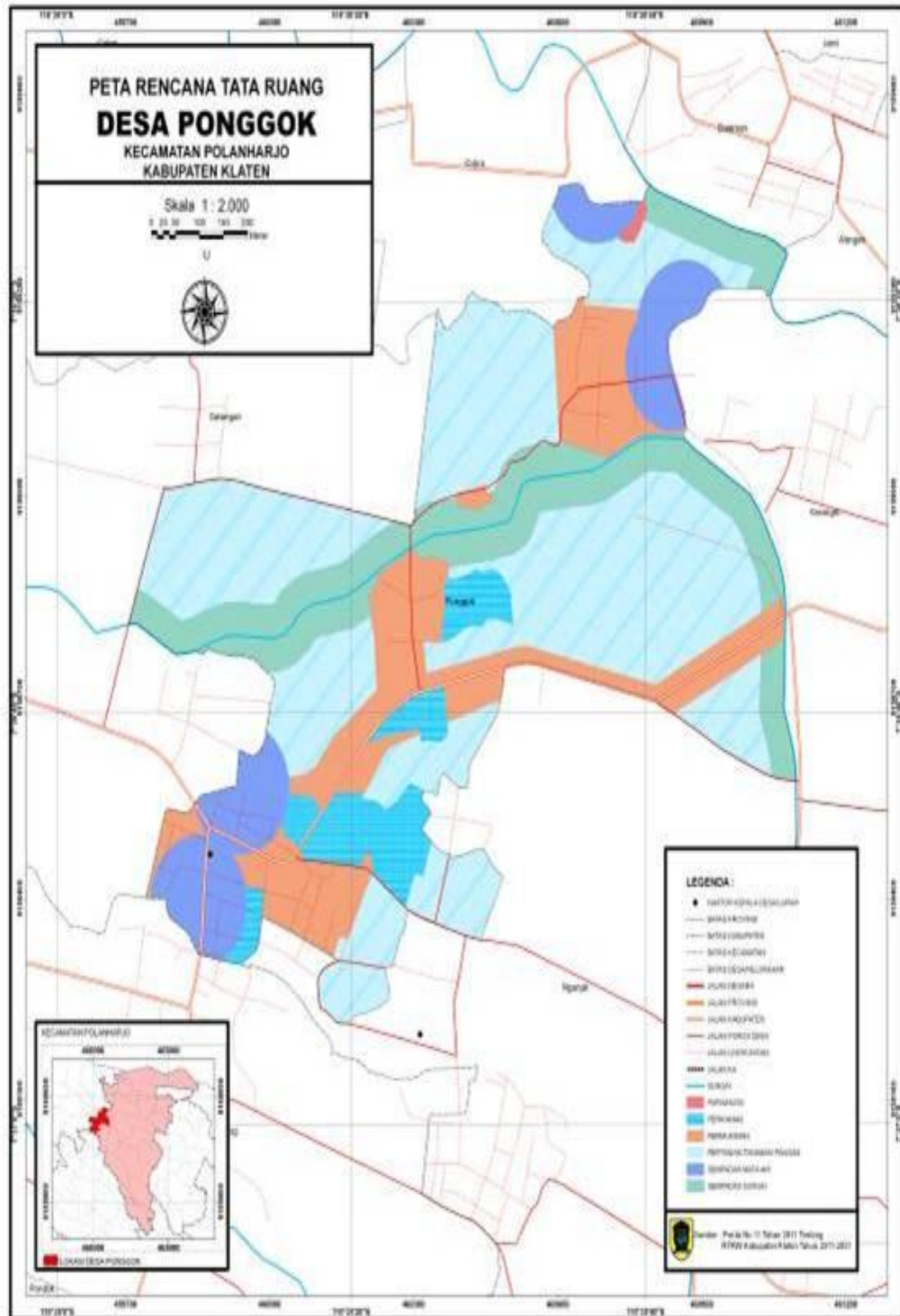
<b>Profil Desa</b>	
Provinsi	Jawa Tengah
Kabupaten/Kota	Klaten
Kecamatan	Polanharjo
Desa/Kelurahan	Ponggok
Alamat Kantor Desa	Jl. Delanggu-Ponggok, Ponggok, Polanharjo, Klaten
Nama Kepala Desa	Junaedhi Mulyono,SH

No Telepon	0821 3587 8888		
Nama Admin Web	Kristanto Joko Raharjo		
No Telepon	0812 1521 1921		
Alamat Email	bumdespongkok.web@gmail.com		
<b>Keterangan Umum Desa</b>			
Luas Desa	77,2255	Ha	
<b>Batas Wilayah</b>			
Utara	Ds. Cokro, Kec. Tulung		
Selatan	Ds. Jeblog, Kec. Karanganom		
Barat	Ds. Dalangan, Kec. Tulung		
Timur	Ds. Nganjat, Kec. Polanharjo		
<b>Kondisi Geografis</b>			
Ketinggian Tanah	225	Mdpl	
Curah Hujan	15 - 429 mm		
Topografi Wilayah	datar		
Jarak dari Desa ke	Jarak	Waktu Tempuh	
Kantor Kecamatan	2,5	Km	5 menit
Kantor Kabupaten/Kota	14	Km	25 menit
Ibukota Provinsi	90	Km	2 jam
Ibukota Negara	545 km	10 jam	

*Sumber: Profil Desa Pongkok 2017*



Gambar 2.3 Peta Rencana Tata Ruang



Sumber: Profil Desa Pongkok 2017

## 2.4.1 Kependudukan

**Tabel 2.8 Penduduk dan Tenaga Kerja**

Penduduk Laki – laki	1042	orang
Penduduk Perempuan	1043	orang
Kepala Keluarga	653	keluarga
Kelahiran Laki – laki		orang selama tahun 2016
Kelahiran Perempuan		orang selama tahun 2016
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Desa	Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Pariwisata	

*Sumber: Profil Desa Ponggok 2017*

## 2.4.2 Visi dan Misi Desa Ponggok

### Visi

Terwujudnya Desa Wisata Ponggok yang mandiri, mampu dalam pengelolaan potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis dan peduli terhadap lingkungan.

### Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi bagi semua lapisan masyarakat dalam pembangunan

4. Mengembangkan Teknologi Informasi
5. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa
6. Mengembangkan seluruh potensi desa
7. Melestarikan kearifan lokal
8. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
9. Meningkatkan kualitas dan membangun kesadaran kesehatan masyarakat
10. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
11. Membangun kerjasama dan kemitraan strategis
12. Mengembangkan kegiatan keagamaan